

SARI

Dianindra Yoga Kumara. 2010. *Implementasi Undang- Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi terhadap Kebebasan Berekspresi Penyanyi Dangdut di Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Jurusan Seni Drama Tari dan Musik, FBS UNNES. Pembimbing I : Drs. Bagus Susetyo, M. Hum dan Pembimbing II : Drs. Suharto, S.Pd.

Pada tahun 2008 yang lalu pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-undang No. 44 tentang pornografi dan pornoaksi. Hal ini mendorong untuk dilakukannya penelitian mengenai implementasi undang-undang tersebut pada penyanyi dangdut di Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi undang-undang anti pornografi dan pornoaksi terhadap kebebasan berekspresi penyanyi dangdut kabupaten Pekalongan dan Kendala yang dihadapi penyanyi dangdut dalam berekspresi setelah dikeluarkannya undang-undang pornografi. Penelitian ini sangat bermanfaat baik bagi penulis sendiri, penyanyi dangdut dan insane seni serta pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi undang-undang.

Objek penelitian berada di Pekalongan yang merupakan salah satu kota kabupaten di Jawa Tengah yang sangat lekat dengan penikmat dan grup musik dangdut. Dalam penelitian ini juga dilakukan pada unsur pelaku dalam musik dangdut diantaranya penyanyi, pemain musik pengiring musik dangdut dan para penikmat seni dangdut. Sample dari penelitian ini adalah masing-masing lima sample.

Berdasarkan penelitian, dengan diundangkannya undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi berisi tentang larangan mempertontonkan atau menonjolkan bagian tubuh tertentu di muka umum yang mengesankan keseksualitasan maka para penyanyi dangdut merasa tidak bebas lagi mengeksplor gerak serta pakaian yang digunakan untuk pentas tidak dapat terlalu sexy karena aturan-aturan dalam isi dari undang-undang pornografi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kebiasaan. Pendapat pelaku musik dangdut memandang dari beberapa aspek penafsiran, pemahaman, penilaian dan pandangan tentang pornografi khususnya dalam dunia seni.

Pendapat atau tanggapan masing-masing individu berbeda, salah satu hal yang membedakannya adalah latar belakang pendidikan dan pengalaman hidupnya. Penyanyi dangdut Kabupaten Pekalongan setuju dengan dikeluarkannya undang-undang pornografi walaupun pada awal dikeluarkannya Undang-Undang Pornografi banyak terjadi pro kontra dari berbagai pihak khususnya para penyanyi karena mereka beranggapan bahwa ada batasan-batasan dalam berekspresi untuk menghasilkan sebuah karya seni khususnya goyang dangdut, tetapi setelah diberlakukannya Undang-Undang Pornografi dan adanya sosialisasi dari dinas terkait terhadap pelaku seni dan seniman. Sehingga para

seniman khususnya penyanyi dangdut mengetahui larangan dan batasan-batasan yang ada dalam Undang-Undang.

